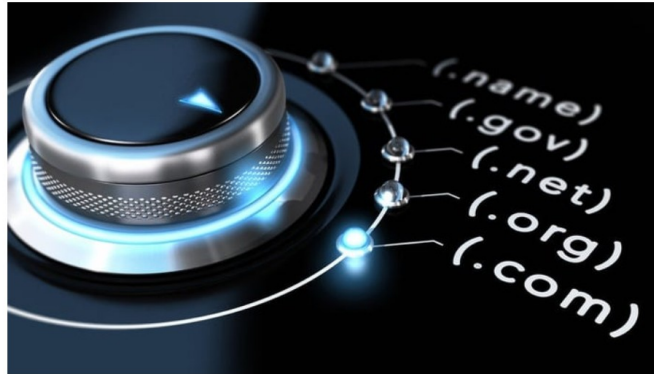
	News Title : Bappebti Kembali Blokir 1.327 Domain Situs Web Entitas Ilegal	
	Media Name : Tirto.id	Journalist : Hanif Reyhan Ghifari
	Publish Date : 16 August 2023	Tonality : Positive
	News Page : 1	News Value : 2,250,000
	Resources : Didid Noordiatmoko (Kepala Bappebti), Aldison (Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan)	Ads Value : 750,000
	Section/Rubrication : Ekonomi	Topic : Blokir Domain Situs Web Situs Ilegal

Bappebti Kembali Blokir 1.327 Domain Situs Web Entitas Ilegal



Ilustrasi domain. Getty Images/Stockphoto



Reporter: Hanif Reyhan Ghifari, tirto.id - 16 Agu 2023 12:57 WIB

Dibaca Normal 1 menit

Bappebti memblokir sebanyak 1.327 domain situs website entitas ilegal di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) pada Januari hingga Agustus 2023.

tirto.id - Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memblokir sebanyak 1.327 domain situs website entitas ilegal di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK). Ribuan domain itu diblokir pada Januari hingga Agustus 2023.

Pemblokiran tersebut dilakukan oleh hasil kerjasama dari Bappebti dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Langkah tersebut adalah upaya strategis Bappebti dalam mencegah potensi kerugian di masyarakat akibat dari kegiatan ilegal bidang PBK.

"Bappebti terus melakukan pengawasan dan pengamatan secara rutin dan berkelanjutan terhadap kegiatan di bidang PBK ilegal. Selain berpotensi merugikan masyarakat, kegiatan ilegal dapat merusak citra industri PBK dan menimbulkan persaingan dunia usaha yang tidak sehat. Jadi, diperlukan langkah untuk meminimalisasi promosi, iklan, dan penawaran entitas ilegal di bidang PBK," ucap Kepala Bappebti Didit Noordiatmoko dikutip dalam keterangannya yang diterima *Tirto*, Rabu (16/8/2023).

Meski sudah dilakukan pemblokiran, Didit menyebut saat ini masih banyak ditemukan promosi, iklan, dan penawaran di bidang PBK ilegal di tengah masyarakat.

Didit menegaskan kepada para entitas ilegal yang telah diblokir untuk mengajukan permohonan perizinan kepada Bappebti dan menurunkan konten yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelahnya, tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan normalisasi dan pencabutan blokir.

Selain itu, Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Aldison mengingatkan, setiap pihak yang melakukan kegiatan perdagangan berjangka di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memiliki izin dari Bappebti. Berikutnya, tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

"Risiko menanti masyarakat yang bergabung atau bertransaksi di entitas ilegal. Apabila terjadi perselisihan, Bappebti selaku regulator tidak dapat memfasilitasi penyelesaiannya. Demikian sebaliknya. Apabila terjadi perselisihan antara masyarakat dengan pelaku usaha yang telah memiliki izin dari Bappebti, Bappebti dapat memfasilitasi penyelesaian perselisihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," terang Aldison.

Aldison juga mengimbau kepada entitas ilegal di bidang PBK untuk mengajukan permohonan perizinan kepada Bappebti serta tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kemudian, kepada masyarakat, Bappebti tidak akan lelah mengimbau agar lebih jeli dalam memilih investasi di bidang PBK.

Aldison mendorong masyarakat untuk selalu bisa memastikan legalitas pialang berjangka yang menawarkan investasi dan jangan sampai mudah tergiur dengan penawaran investasi yang memberikan iming-iming keuntungan pasti di luar batas kewajaran yang didapatkan dalam waktu singkat.

"Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, periksa terlebih dahulu profil dan legalitas pelaku usaha di bidang PBK. Caranya, mengakses website resmi Bappebti," pungkas Aldison.